
Peran UNICEF dalam Mendukung Upaya Pemenuhan Hak Anak di Indonesia dalam Pendidikan Sesuai Tujuan 4 SDGs Tahun 2016-2019

Gusti Ayu Made Indra Sawitri¹⁾, Putu Titah Kawitri Resen²⁾, Putu Ratih Kumala Dewi³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Hubungan Internasional/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Universitas Udayana.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dari organisasi internasional yang memiliki mandat untuk menjamin kesejahteraan anak melalui studi pada peran UNICEF dalam membantu menjamin hak anak di Indonesia sesuai dengan tujuan 4 SDGs. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Landasan konsep pada penelitian ini diantaranya peran dan fungsi organisasi internasional, *power of international organization* serta peran organisasi internasional dalam bidang pendidikan untuk merangkai analisis dalam topik yang diangkat. Penelitian ini menemukan bahwa UNICEF sebagai sebuah organisasi internasional menjalankan perannya sebagai aktor melalui fungsi *norms, socializations, informations* dan *operations*. Penelitian ini melihat otoritas moral serta fungsi informasi untuk menjalankan mandatnya serta keikutsertaan UNICEF dalam menyusun program terkait pengoptimalan pencapaian SDGs sehingga peran yang dijalankan oleh UNICEF dapat membantu Indonesia dalam memenuhi tujuan 4 SDGs. UNICEF sebagai aktor dapat mendukung Indonesia guna memenuhi tujuan 4 SDGs melalui fungsi *norms* dengan dibuatnya CPAP. Fungsi *socializations* dengan diadakannya kampanye pendidikan inklusif. Fungsi *informations* yakni pembuatan baseline serta fungsi *operations* yang direalisasikan menjadi beberapa program seperti program peningkatan literasi, program roots dan PAUD HI.

Kata-kunci : Indonesia, Pendidikan, SDGs, UNICEF

Abstract

This study aims to analyze international organization's role that mandated to ensure child welfare through a study on UNICEF's role in promoting the fulfillment of children's rights in Indonesia according to the goals of the 4 SDGs. This research is qualitative descriptive research that use data collection techniques through library research. This research use conceptual basis, namely the role and function of international organizations, power of international organizations and international organization's role in the field education. To frame analytical of the topic raised. This study found that UNICEF as an international organization that plays roles as an actor through their function as norms, socializations, informations and operations. This research examines the moral authority and informational functions of UNICEF, which are manifested through UNICEF's entry into Indonesia to fulfill its mandate and its involvement in developing programs related to optimizing

the achievement of SDGs. As a result, the role played by UNICEF can contribute to assisting Indonesia in meeting SDG goal 4. UNICEF as an actor supports Indonesia in fulfilling the goals of the 4 SDGs through the norms function by making CPAP. Socializations function by holding inclusive education campaigns. The information function is the creation of a baseline as well as the operations function which is realized into several programs such as the literacy improvement program, the roots program and PAUD HI.

Keywords : *education, Indonesia, SDGs, UNICEF*

Kontak Penulis

Gusti Ayu Made Indra Sawitri

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Jl. Jend. Sudirman, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali 80234

Telp: 087761542130

E-mail : indrasawitri883@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kewibawaan suatu negara. Mings & Arreguín-toft (2017) dalam tulisannya mengatakan bahwa potensi kekuatan yang dimiliki oleh suatu negara bergantung pada sumber kekuatan alami dari negara tersebut. Selain letak geografis dan sumber daya alam, populasi menjadi salah satu *natural sources of power* terpenting yang dimiliki oleh negara. Bukan hanya jumlah penduduk yang besar, namun kualitas penduduk juga menjadi faktor penentu kekuatan suatu negara. Mings & Arreguín-toft (2017) juga menambahkan bahwa negara-negara dengan populasi yang berpendidikan tinggi serta terampil dapat mengisi ruang ekonomi dan politik yang besar. Oleh karena itu sumber daya manusia menjadi salah satu *element of power* bagi suatu negara.

Indonesia sendiri sudah mengamanatkan pendidikan dalam UUD 1945 yakni pasal 31 mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki warga negara dalam hal pendidikan. Sayangnya, kondisi pendidikan di Indonesia belum dapat dikatakan ideal, khususnya bagi anak, seperti yang ditunjukkan oleh data berikut. Dalam survei PISA, yang mana survei ini merupakan rujukan untuk menilai kualitas pendidikan anak di seluruh dunia, tahun 2015 memperlihatkan bahwa Indonesia mendapat peringkat ke-62 dari 70 negara (OECD, 2016). Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 memperlihatkan indeks pembangunan manusia di Indonesia sebesar 69,55. Besaran indeks yang diperoleh oleh Indonesia membuat Indonesia berada pada posisi ke-5 di ASEAN, di bawah Singapura dengan IPM sebesar 92.5, Brunei Darussalam dengan IPM sebesar 86.5, Malaysia sebesar 78.9 dan Thailand dengan IPM sebesar 74.

Kurang majunya pendidikan di Indonesia disebabkan oleh masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada sistem pendidikan Indonesia seperti kurang efektifnya sistem pendidikan yang berkaitan dengan efisiensi pengajaran di Indonesia, kualitas sarana dan prasarana belajar, belum maksimalnya kualitas guru yang berkaitan dengan rendahnya prestasi siswa serta biaya pendidikan yang masih terbilang mahal (Nurfatimah et al., 2022). Kualitas pendidikan di Indonesia juga menjadi perhatian oleh organisasi internasional, seperti halnya *United Children's Emergency Fund* (UNICEF). UNICEF melaporkan 55 persen anak usia 15 tahun di Indonesia belum dapat membaca dengan baik, serta 69 persen mendapatkan angka yang rendah dalam matematika. Anak dengan rentang usia 7-18 tahun yang tidak meneruskan sekolah sebesar 4,5 juta. Selain itu 67 persen anak dengan disabilitas pada usia sekolah dasar serta sekolah menengah tidak melanjutkan sekolahnya, sehingga hal ini membuat masih banyak anak sekolah yang harus berjuang guna menguasai keterampilan akademik dasar.

Kolaborasi yang terjalin antara UNICEF dengan Indonesia dalam mengatasi permasalahan anak adalah cerminan dari patuhnya Indonesia pada Konvensi Hak-Hak Anak (Safira et al, 2022). Suatu negara umumnya memiliki hubungan kerja sama guna memaksimalkan tercapainya beberapa kepentingan tertentu (Ismiya et al, 2021). Kerjasama Indonesia dengan UNICEF akan berpengaruh dengan melihat pengalaman UNICEF sebagai organisasi internasional yang bergerak untuk menjamin kesejahteraan anak di berbagai negara, sehingga pengalaman yang dimiliki oleh UNICEF dapat diterapkan untuk menjadi awalan dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak di Indonesia (Pujiastuti, 2015). Diterimanya organisasi

internasional dengan baik oleh negara dilandasi adanya tujuan serta kepentingan yang sama baik untuk UNICEF maupun pemerintah Indonesia.

Pentingnya pendidikan menyebabkan berbagai negara menganggap penting untuk memajukan pemenuhan pendidikan yang berkualitas (Ardianti, 2018). Pendidikan menjadi salah satu langkah untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDGs ke-4 mengenai pendidikan berkualitas (Bappenas, nd). SDGs merupakan program pengganti MDGs dimana MDGs sendiri berakhir pada tahun 2015. Pendidikan berkualitas pada goals ke-4 SDGs dari 17 goals yang diprogramkan memiliki tujuan untuk memberikan jaminan mengenai pendidikan berkualitas serta inklusif dan merata (Sustainable Development Goals, nd). Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan mengkaji mengenai peran UNICEF dalam meningkatkan pemenuhan hak anak dalam memperoleh pendidikan guna memenuhi tujuan empat SDGs di Indonesia.

Untuk menunjukkan kebaruan dari penelitian ini, penulis menyertakan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi dasar untuk melengkapi tinjauan Pustaka dan juga pembeda dengan penelitian sebelumnya. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang penulis jadikan rujukan pada penelitian ini.

Penelitian pertama adalah penelitian dari Melia Dwiyani et al., (2015) dengan judul "Peran UNICEF Dalam Membantu Memajukan Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan di Nigeria". Dalam penelitian ini ditemukan bahwa UNICEF membantu pemerintah Nigeria dalam memajukan pendidikan anak-anak di Nigeria dengan 4 tahapan sebagai organisasi internasional. Namun program-program yang dijalankan UNICEF terkait pendidikan belum terlaksana maksimal untuk menyentuh anak-

anak terutama anak-anak dengan kebutuhan khusus belum ada dibahas. Penelitian ini menggunakan konsep peran organisasi internasional, intervensi pembangunan, pendidikan serta hak-hak anak. Penelitian ini membantu penulis dalam memahami mengenai peran UNICEF sebagai organisasi internasional guna memberikan bantuan mengenai hak anak terkait pendidikan dalam suatu negara.

Penelitian kedua adalah penelitian Priyanka & Heryadi (2020) dengan judul "Kerjasama UNICEF dengan Indonesia dalam Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua sebagai Tujuan Dua MDGs". Penelitian ini menggunakan teori kerjasama internasional serta teori organisasi internasional. Dalam membantu tercapainya pendidikan dasar untuk semua di Indonesia, UNICEF dan Indonesia melakukan kerjasama. Penelitian ini membantu penulis untuk melihat bagaimana kontribusi UNICEF terkait pendidikan di Indonesia sebelumnya. Penulis juga melihat pembeda pada penelitian tersebut yang mana peneliti memfokuskan penelitiannya pada konsep MDGs yang merupakan program yang telah berakhir pada tahun 2015.

Penelitian ketiga adalah penelitian Herviryandha & Nashir, (2022) dengan judul "Peran United Nation Children's Fund (UNICEF) dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Anak di Indonesia Periode 2014-2017". Pada penelitian tersebut, peneliti menggunakan teori peran, konsep organisasi internasional serta perkawinan anak. Guna mencapai tujuan tersebut UNICEF bersama pemerintah Indonesia memiliki ruang lingkup program.

Guna mengatasi masalah pernikahan anak, UNICEF bersama pemerintah Indonesia menjalankan dua program yakni Pendidikan serta Perkembangan Remaja dan juga Komunikasi, Mobilisasi Sumber Daya serta

Kemitraan. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yakni kedua penelitian melihat peran UNICEF dalam menanggulangi permasalahan anak khususnya di Indonesia walaupun dengan fokus penelitian yang berbeda. peneliti menemukan bahwa pernikahan anak dan pendidikan memiliki hubungan yang kausalitas, dimana anak-anak yang mengalami putus sekolah cenderung akan menikah lebih cepat.

Guna menjawab pertanyaan penelitian ini, penulis mengacu pada konsep peran dan fungsi organisasi internasional yang dikemukakan oleh Archer. Peran dan fungsi organisasi internasional tersebut juga akan dibantu dengan konsep yang dijabarkan oleh Barkin mengenai *power of international organizations*. Gerbert (1977) menjelaskan bahwa organisasi internasional merupakan suatu gagasan yang dibuat untuk menertibkan hubungan internasional dengan membangun ikatan kuat melintasi batas-batas antara pemerintah maupun kelompok sosial. dengan harapan dapat mencapai kepentingan bersama dengan peran yang dimilikinya untuk melakukan fungsi-fungsi penting dalam ranah internasional.

Archer (2001) menjelaskan terdapat tiga peran dari organisasi internasional yakni peran instrumen, arena dan aktor. Ketiga peran tersebut dijalankan oleh organisasi internasional dalam isu-isu yang berbeda. Meskipun ketiga peranan ini dapat dijalankan oleh organisasi internasional namun tidak semua peran dapat berjalan dalam satu waktu. Dalam penelitian ini lebih melihat bahwa keterlibatan UNICEF berperan sebagai aktor dikarenakan UNICEF sedang menjalankan mandatnya sebagai suatu organisasi yang bersifat global.

Untuk memperjelas kerangka analisis peran sebagai aktor, penelitian ini dibantu

konsep *power of Ios* oleh Barkin (2006). Konsep yang dijabarkannya yakni *power of international organizations* menyatakan bahwa organisasi internasional memungkinkan untuk menjalankan perannya karena memiliki *power* atau dengan kata lain dalam isu tertentu organisasi internasional dapat menjalankan tugasnya dengan ketiadaan atau minimnya intervensi dari negara.

Menurut Barkin (2006) *power* yang dimiliki oleh organisasi internasional terletak pada otoritas moral dan fungsi informasi yang dimilikinya. Peran yang dimainkan oleh organisasi internasional dijelaskan berdasarkan fungsi yang dijalankannya. Dalam penelitian ini UNICEF sebagai sebuah organisasi internasional dengan mandat untuk menjamin kehidupan anak dengan memainkan perannya sebagai aktor menjalankan beberapa fungsinya yakni fungsi *norms, socialization, information dan operations*.

Aktor transnasional serta aktor internasional memiliki peran yang penting dalam pembentukan sistem pendidikan global (Martens, 2010). Selaras dengan hal tersebut Niemann (2022) menjelaskan bahwa organisasi internasional atau organisasi antar pemerintah tertentu berperan sentral pada diskusi global mengenai pendidikan. Organisasi internasional dalam bidang pendidikan dapat memiliki gagasan sendiri mengenai tujuan kebijakan yang harus dikejar. Organisasi internasional dianggap tertarik dalam menyebarkan serta mempengaruhi perilaku orang lain terkait kebijakan yang telah organisasi internasional buat, baik itu kepada negara bagian, departemen subs negara bagian, lembaga internasional lainnya maupun pada individu.

Hal tersebut berkaitan dengan otoritas moral dan legitimasi yang dimiliki oleh organisasi internasional (Niemann, 2022). Organisasi internasional menyebarluaskan ide

atau gagasan yang mereka peroleh melalui berbagai cara seperti berupa laporan, rekomendasi, deklarasi, symposium dan sebagainya (Niemann, 2022). Niemann (2022) dalam tulisannya juga menjelaskan bahwa gagasan organisasi internasional yang mendasar mengenai pendidikan dicerminkan melalui sesuatu yang mereka terbitkan seperti makalah, rekomendasi kebijakan, deklarasi, analisis kebijakan yang terperinci, dan sejenisnya.

METODE

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif pada penelitian ini. Penulis menggunakan sumber data dari penelitian-penelitian terdahulu yang mana penelitian tersebut menjadi acuan penulis dalam membantu menganalisis data guna mempermudah penelitian penulis. Tidak hanya itu, penulis juga menggunakan data yang dikeluarkan oleh *website-website* resmi dari internet dengan melihat relevansi data tersebut dengan penelitian penulis, seperti *website* resmi *United Nation International Children's Emergency Fund (UNICEF)* dan *website* dari Bappenas.

organisasi internasional menjadi unit analisis dalam penelitian ini dan negara menjadi level analisis. Maka dari itu terlihat dalam penelitian ini ditemukannya pola interaksi antara para aktor dalam hubungan internasional yang memiliki pengaruh pada kehidupan sekitar. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pemilahan berbagai data yang sudah dikumpulkan. Pemilahan data tersebut dilakukan dengan cara menganalisis kaitannya dengan fokus topik pada penelitian. Data yang sudah relevan selanjutnya dimasukkan dalam penelitian dengan cara mendeskripsikan melalui tulisan, tabel, grafik, ataupun data berupa angka sebagai data pendukung yang berikutnya dikembangkan

dengan deskripsi analisis dan penarikan kesimpulan.

Setelah mengumpulkan dan menganalisa data-data yang telah tersedia, selanjutnya penulis mengorganisasikan data-data tersebut serta mensinkronisasi dengan waktu berlangsungnya kejadian maka hal tersebut dapat memudahkan pembaca untuk memahami alur dari penelitian ini mulai dari belum idealnya pendidikan di Indonesia sehingga UNICEF juga turut serta membantu memaksimalkan pendidikan di Indonesia sesuai tujuan 4 SDGs.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SDGs 4 Isu Pendidikan di Indonesia

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu agenda pembangunan dunia. *UN Summit on MDGs* dan dokumen "*The Future We Want*" menjadi pendorong utama dalam penyusunan agenda SDGs (Bappenas, nd). Pendidikan menjadi salah satu isu yang masuk pada tujuan SDGs. Dewasa ini pendidikan merupakan hak mendasar yang dimiliki oleh manusia karena peran pendidikan sangat penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Secara global pendidikan anak masih menjadi sebuah isu di beberapa negara seperti Nigeria yang berupaya untuk meningkatkan kualitas sektor pendidikannya karena menurut data dari UNICEF sebanyak 10,5 juta dari 34,9 juta anak keluar dari sekolah (Dwiyani, 2015). Tidak hanya Nigeria, Indonesia juga menjadi negara yang tengah menghadapi isu pada sektor pendidikan.

Pendidikan yang memiliki peranan besar dalam memajukan sumber daya manusia di suatu negara tentunya juga menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia. Sejak tahun 2005 Indonesia telah menjadi

negara pihak dalam Kovenan Ekosob, hal tersebut membuat Indonesia terikat oleh berbagai kewajiban yang telah diatur dalam Kovenan seperti halnya kewajiban untuk menghormati, melindungi serta memenuhi hak setiap warga negara Indonesia dalam hal pendidikan (Komnasham, 2017).

Agenda global yang juga berkaitan dengan pemenuhan hak seseorang adalah SDGs. Indonesia juga telah mengadopsi agenda SDGs. dibawah naungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) serta dengan adanya kerjasama yang kuat oleh berbagai pihak, Indonesia menjalankan berbagai Upaya mendalam guna mengintegrasikan agenda SDGs lebih lanjut untuk dicantumkan ke dalam rencana pembangunan nasional serta subnasional.

Dalam menghadapi tantangan pada sektor pendidikan di Indonesia, berbagai program serta badan naungan PBB di Indonesia termasuk UNICEF turut berkomitmen untuk memainkan peran yang kuat sebagai organisasi internasional. Peran tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah Indonesia guna mencapai tujuan 4 SDGs. Tiga langkah utama yang dilakukan yakni advokasi kebijakan serta konsultasi, meningkatkan kapasitas dan juga berbagi pengetahuan (Komnasham, 2017).

Potret Ketimpangan Pendidikan di Indonesia

Berkaitan dengan angka partisipasi sekolah. Badan Pusat Statistik (2016) memperlihatkan bahwa capaian pada Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk pendidikan pada anak usia dini dengan usia 3-6 tahun secara nasional sayangnya masih jauh dibawah target pembangunan yang mana APK PAUD 3 sampai 6 tahun hanya sebesar 34,62 persen.

Ketimpangan juga masih terjadi dalam partisipasi penduduk untuk menempuh pendidikan dasar yang mana dari 34 provinsi

di Indonesia hampir seluruhnya telah menyentuh angka 90 persen, namun provinsi Papua hanya mencapai 79,14 persen. Berkaitan dengan angka untuk melek huruf, penduduk yang berumur 15-24 tahun masih kurang dari 100 persen. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat penduduk pada rentang usia 15-24 tahun yang tidak bisa membaca dan menulis.

UNICEF Sebagai Pengemban Mandat SDGs 4

UNICEF berdiri pasca perang dunia kedua atau tepatnya tahun 1946. Mandat awal yang dibawa oleh UNICEF adalah untuk membantu anak-anak serta remaja yang mengalami ancaman pada kehidupan dan masa depannya karena perang. Mandat yang dipegang oleh UNICEF menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas organisasi internasional ini.

Sebagai sebuah organisasi internasional, UNICEF secara konsisten berupaya melindungi hak-hak dan kesejahteraan semua anak, tanpa memandang identitas mereka atau lokasi tempat tinggal mereka. UNICEF hadir hingga saat ini guna membantu dalam merealisasikan adanya kesempatan pada anak serta remaja dengan nasib kurang beruntung guna meningkatkan potensi yang mereka miliki khususnya pada bidang pendidikan

Archer (2001) menjelaskan bahwa aktor merupakan salah satu peran yang dimiliki organisasi internasional. Peran aktor tersebut menyebabkan organisasi internasional dapat menjalankan tugasnya dengan ketiadaan atau minimnya intervensi dari negara. Berkaitan dengan hal tersebut UNICEF sebagai organisasi internasional memiliki rencana strategisnya sendiri yang selaras dengan agenda SDGs bahwa semua anak dapat hidup terlindungi dengan kondisi sehat, hidup dalam lingkungan yang bersih dan mendapatkan kesempatan belajar yang adil.

Peran aktor yang dijalankan organisasi internasional selaras dengan otoritas moral yang dijelaskan oleh Barkin (2006) bahwa organisasi internasional dapat menjalankan mandatnya dalam hubungan internasional berkaitan dengan area isunya untuk membuat orang serta suatu negara menyimaknya. Disepakatinya agenda SDGs memberikan penekanan pada pemerintah suatu negara bahwa mereka memiliki prioritas serta tanggung jawab untuk menindaklanjuti serta meninjau kemajuan dalam mencapai tujuan 4 SDGs di tingkat nasional, regional dan global.

Martens., et al (2010) menjelaskan bahwasanya aktor transnasional serta aktor internasional berperan penting dalam pembentukan sistem pendidikan global, sehingga dari berbagai fokus isu yang dijalankan oleh UNICEF, pendidikan merupakan isu yang menjadi perhatian khusus bagi UNICEF. UNICEF menjelaskan bahwa seorang anak memiliki hak atas pendidikan yang berarti tiap anak memiliki hak untuk belajar.

Dengan legitimasi dan otoritas moral yang dimiliki oleh organisasi internasional (Niemann, 2022) berkaitan dengan disepakatinya 17 points dari SDGs oleh pemimpin dunia yang bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih aman, bersih dan sejahtera pada tahun 2030. UNICEF menemukan masih terdapat berbagai permasalahan yang masih ada dalam kehidupan anak-anak di Indonesia termasuk dalam hal pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, UNICEF dengan mandat yang dimilikinya turut serta mendukung tercapainya pemenuhan hak anak dalam pendidikan sesuai tujuan 4 SDGs.

Peran UNICEF dalam Mendukung Pencapaian Pemenuhan Hak Anak dalam

Pendidikan di Indonesia Sesuai Tujuan 4 SDGs

Priyanka (2020) menjelaskan dengan otoritas global yang dimiliki oleh UNICEF, organisasi internasional ini dapat menjamin bahwasanya semua anak didunia memperoleh hal-hal yang terbaik dalam hidupnya, serta anak-anak dapat bertumbuh dengan bebas dari kemiskinan, diskriminasi serta ketimpangan khususnya dalam hal pendidikan. Mandat yang diemban UNICEF terkait pencapaian SDGs khususnya tujuan 4 SDGs menyebabkan UNICEF memiliki otoritas moral sehingga mereka dapat menjalankan aksinya membantu Indonesia untuk pemenuhan hak anak dalam pendidikan sesuai tujuan 4 SDGs, UNICEF menjalankan peran aktor.

UNICEF Menjalankan Peran Sebagai Aktor dalam Upaya Mencapai Tujuan 4 SDGs

Archer (2001) dalam tulisannya membagi peran yang dijalankan organisasi internasional menjadi tiga bagian, salah satunya adalah peran sebagai aktor. Peran aktor yang dikemukakan oleh Archer (2001) diperkuat dengan Barkin (2006) yang menjelaskan bahwa *power* yang dimiliki oleh organisasi internasional terletak pada otoritas moral dan fungsi informasi yang dimilikinya. Otoritas moral yang dimiliki oleh UNICEF membuat UNICEF dapat berkomitmen dalam menjamin kehidupan anak dengan memantau negara-negara anggota untuk melokalkan SDGs serta menetapkan target nasional yang tegas terkait dengan anak-anak, membangun sistematika agar dapat melacak kemajuan serta ketimpangan sehingga dapat memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal (Unicef, nd).

UNICEF sebagai organisasi internasional yang memiliki peran besar dalam agenda SDGs menyebabkan UNICEF juga berkolaborasi baik dengan pemerintah

Indonesia maupun mitra lainnya dalam pencapaian tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Merujuk pada peran yang dijalankan oleh UNICEF dalam membantu pencapaian tujuan 4 SDGs, maka peran tersebut akan diperjelas dengan fungsi yang dijalankan oleh UNICEF. Archer (2001) menjelaskan bahwa beberapa organisasi akan menjalankan peran dan fungsi yang terbatas, hal tersebut berkaitan dengan mandat yang dimiliki serta isu yang tengah dihadapi.

UNICEF yang memainkan perannya sebagai aktor menjalankan beberapa fungsi guna membantu pemenuhan hak anak dalam memperoleh pendidikan di Indonesia sesuai tujuan 4 SDGs, fungsi tersebut diantaranya adalah:

A. Fungsi *Norms*

Archer (2001) menjelaskan bahwa organisasi internasional memiliki fungsi dalam membuat norma, hal ini menyebabkan organisasi internasional memberikan kontribusi yang terbilang besar dalam posisinya sebagai aktor untuk kegiatan normatif dalam sistem internasional. UNICEF menjelaskan bahwa seorang anak memiliki hak atas pendidikan yang berarti tiap anak memiliki hak untuk belajar. Upaya pencapaian hak pendidikan terhadap anak berkaitan dengan tujuan 4 SDGs dicanangkan dalam Country Program Action Plan (CPAP). CPAP yang diprogramkan untuk tahun 2016-2020 menyusun rencana kerja guna dapat mendukung terkait dengan pemenuhan hak-hak anak dan Wanita dengan berfokus pada keberlangsungan hidup, perkembangan dan juga perlindungan untuk Ibu dan Anak (KHPPIA).

B. Fungsi *Socializations*

Archer (2001) menjelaskan bahwa fungsi sosialisasi bertujuan untuk menumbuhkan loyalitas bagi negara anggota mengenai sistem

sehingga negara anggota dapat menerima nilai-nilai yang berlaku dari sistem dan lembaga tersebut. Dalam rangka menjalankan isi konvensi hak anak yang telah disetujui oleh Indonesia dimana isi dari konvensi hak anak tersebut berkaitan dengan tujuan 4 SDGs mengharuskan negara untuk memenuhi semua hak-hak yang dimiliki anak khususnya dalam bidang pendidikan.

Pendidikan inklusif menjadi salah satu isu SDGs yang gencar dikampanyekan karena berdasarkan data dari UNICEF, 67 persen anak dengan disabilitas di Indonesia yang berusia sekolah dasar serta sekolah menengah tidak melanjutkan sekolah (UNICEF nd). Oleh sebab itu, untuk mengkampanyekan pendidikan inklusif pada tanggal 7 Agustus 2019 UNICEF menginisiasi kampanye pendidikan inklusif yang bertajuk “Kolaborasi Tanpa Batas” bersama Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur dalam rangka festival olahraga inklusif dan Hari Anak Nasional PAUD yang berkaitan dengan perayaan HUT ke 74 Republik Indonesia.

C. Fungsi *Informations*

Fungsi ini menunjukkan bahwa organisasi internasional memiliki peran yang penting dalam ranah komunikasi dan informasi. Archer (2001) menjelaskan dalam fungsi ini organisasi internasional berupaya untuk menjalankan tugasnya dalam melakukan pencarian serta mengumpulkan informasi dengan anggota maupun mitra lainnya yang setelahnya dapat diolah dan disosialisasikan. Berdasarkan hal itu, UNICEF dalam menjalankan fungsi informasi mengeluarkan berupa laporan terkait kondisi Indonesia dalam tujuan mencapai target SDGs khususnya pada tujuan 4 SDGs.

Laporan yang disusun adalah Baseline. Baseline merupakan laporan yang dirancang oleh UNICEF bersama Kementerian PPN/Bappenas dengan tujuan untuk lebih

mendalami pemahaman mengenai kondisi anak-anak di Indonesia saat ini. Laporan tersebut menyajikan informasi awal mengenai indikator dalam SDGs berkaitan dengan anak yang dilihat relevan untuk memantau situasi anak di bawah masing-masing tujuan SDGs serta menjadi dokumentasi awal, yang mana anak Indonesia dicantumkan sedari awal disusunnya agenda SDGs.

D. Fungsi *Operations*

Archer (2001) menjelaskan bahwa organisasi internasional melakukan fungsi operasionalnya sama seperti pemerintah suatu negara yang mana organisasi internasional dapat memberikan bantuan pada suatu negara. Berkaitan dengan hal tersebut organisasi internasional berfungsi menjalankan operasinya masing-masing, setiap organisasi internasional memiliki bidang fokus tersendiri serta berhak untuk menjalankan.

Dalam meningkatkan pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan di Indonesia guna mencapai tujuan 4 SDGs tahun 2016-2019 fungsi *operations* UNICEF dijalankan melalui beberapa program, diantaranya: program peningkatan literasi yang mana program ini dilaksanakan di daerah Papua dan Papua Barat. Program ini merupakan Program Pilot (Program uji coba). Para pelatih dan pendamping telah diberikan panduan praktis dalam bentuk buku saku yang berisi aturan-aturan terkait perlindungan anak dan konvensi hak anak. Dalam proses membaca, siswa akan dihubungkan dengan kearifan lokal berkaitan dengan cerita-cerita dalam buku yang dikembangkan oleh UNICEF dan YLAI.

Program roots juga menjadi program yang dikembangkan oleh UNICEF guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Keysinaya (2022) menjelaskan bahwa program Roots adalah suatu model intervensi tindak perundungan di sekolah yang

disesuaikan kembali oleh UNICEF Indonesia berdasarkan program sejenis yang telah dilaksanakan di Amerika Serikat tahun 2015. UNICEF memiliki mandat untuk menjamin perlindungan hak anak menyebabkan UNICEF bersama pemerintah Indonesia memerangi aksi perundungan dengan program Roots. Setelah terlaksananya program roots menghasilkan dampak positif terkait menurunnya kasus perundungan serta naiknya kesadaran siswa mengenai tindak perundungan.

PAUD HI menjadi salah satu program yang difokuskan UNICEF. Pendidikan anak usia dini memegang peran krusial dalam kemajuan anak dalam berbagai aspek, termasuk perkembangan kognitif, kemampuan bahasa, interaksi sosial, kesejahteraan emosional, dan kesehatan fisik. Berdasarkan peninjauan yang dilakukan pada enam kabupaten di Papua dan Papua Barat, ditemukan bahwa hanya 56 persen siswa dibangku sekolah dasar yang telah mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD) sebelum memasuki bangku sekolah dasar. Angka ini terbilang lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional yang umumnya sekitar 80 persen (Nursalim et al, 2019).

Sejak tahun 2017, UNICEF dan Bank Central Asia (BCA) memberikan dukungan kegiatan pada pemerintah Indonesia dalam mengenalkan pendidikan pengembangan anak usia dini di Provinsi Papua Barat. Program PAUD memiliki perbedaan dengan tingkat peningkatan pada jenjang pendidikan lainnya. Pengembangan anak usia dini membentuk dasar yang penting dalam membangun kemampuan literasi dan numerasi anak.

PENUTUP

UNICEF memiliki tujuan untuk membantu mewujudkan kesempatan bagi anak dan remaja yang bernasib kurang beruntung, dengan maksud untuk meningkatkan potensi

yang mereka miliki. Melalui upaya ini, UNICEF berupaya meningkatkan kualitas dalam sektor kesehatan, kesetaraan, gizi, kesejahteraan, serta pendidikan. Penelitian ini berfokus pada tindakan aktif UNICEF sebagai sebuah organisasi global yang menjalankan mandatnya dalam perannya sebagai aktor. *Power* yang dimiliki oleh UNICEF menyebabkan mereka dapat menjalankan perannya dalam isu tertentu yang dalam hal ini adalah isu pendidikan berkaitan dengan Tujuan 4 SDGs.

UNICEF dengan mandat yang dimilikinya memiliki otoritas moral dalam menangani berbagai isu di negara anggotanya sehingga UNICEF turut berkomitmen untuk memainkan peran yang kuat sebagai organisasi internasional yang dapat membantu pemerintah Indonesia guna mencapai tujuan 4 SDGs. UNICEF yang menjalankan perannya sebagai aktor dalam mendukung pemenuhan hak anak di sektor pendidikan sesuai dengan tujuan 4 SDGs diperjelas dengan beberapa fungsi yang dijalankannya. Fungsi yang dijalankan oleh UNICEF membuat UNICEF dapat menginisiasi berbagai program seperti dibuatnya *Country Program Action Plan* (CPAP), kampanye pendidikan inklusif, pembuatan Baseline, Program peningkatan literasi, Program roots dan PAUD HI. Dari berbagai program yang dijalankan UNICEF terbilang berhasil untuk mengatasi permasalahan isu terkait.

UNICEF juga mengalami tantangan dalam menjalankan berbagai program terkait pencapaian tujuan 4 SDGs. Seperti halnya pada program pendidikan inklusif dimana ketersediaan data yang kurang lengkap terhadap anak dengan disabilitas, kualitas guru yang belum memadai serta UNICEF juga perlu bekerja lebih keras untuk mengubah persepsi masyarakat khususnya keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas bahwa anak penyandang disabilitas tidak akan dapat merasakan manfaat pendidikan seperti apa

yang dirasakan oleh anak yang bukan penyandang disabilitas.

Daftar Pustaka

Buku:

- Archer, C. (2001). *International Organizations* Third Edition. Routledge.
- Barkin, J, S. (2006). *International Organization: Theories and Institutions*.
- Barnet. M., Finnemore., (2004). *Rules for The World: International Organization In Global Politics*. Cornel Univ Pr.
- Beland. D., Cox. H. R., (2010). *Ideas and Politics in Social Science Research*. Oxford University.
- Gerbert, P., & de Brito, C. (1977). *As organizações internacionais*.
- Miles, M.B Huberman, A. ., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3* (ketiga). Sage Publications
- Niemann, D. (2022). *International Organizations in Education: New Takes on Old Paradigms*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-78885-8_5
- Martens. K., & Windzio, Michael. (2021). *Global Pathways to Education*. Palgrave Macmillan
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.

Jurnal:

- Ardianti, D.J., et al. (2018). Responsibility to Protect Pemerintah Laos Mengatasi Masalah Pendidikan Melalui Program Education for All dari UNESCO Tahun 2003-2015. *Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional (DIKSHI)*. 1, (2)
- Herviryandha, & Nashir, A. K. (2022). Peran United Nations Children'S Fund (Unicef) Dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Anak. *Perspektif*, 1(3), 251–263.

- <https://doi.org/10.53947/perspekt.v1i3.115>
- Ismiya, A., et al. (2021). Otoritas ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Dalam Skema Prinsip Non-Intervensi. *Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional (DIKSHI)*. 1, (1)
- Keysinaya, E. Y. (2022). Peran UNICEF Indonesia Menangani Perundungan di Sekolah Melalui Program Roots. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 8(2), 207-224.
- Melia Dwiyani, M., Rainy Priadarsini, N., & Prameswari, A. (2015). Peran Unicef Dalam Membantu Memajukan Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Di Nigeria. *Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional (DIKSHI)*. 1(03).
- Nurfatihah, S. A., Hasna, S., & Rostika, D. (2022). Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6145–6154. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3183>
- Nursalim, N., & Raharja, S. P. (2019). Memperkuat pelebagaan model pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI) di kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 18-28.
- Priyanka, E., & Heryadi, D. (2020). Kerja Sama UNICEF dengan Indonesia dalam Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua sebagai Tujuan Dua MDGs. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 2(1), 68. <https://doi.org/10.24198/padjir.v2i1.26179>
- Safitri, A. O., Yuniarti, V. D., & Rostika, D. (2022). Upaya peningkatan pendidikan berkualitas di Indonesia: Analisis pencapaian sustainable development goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*. 6(4).
- Sirait, S.C. (2017) Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 158-182.
- Witdianti, Y. (2018). Strategi literasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia berbasis kearifan local program kemitraan UNICEF. *Pesona: Pekan Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. 1(1).jubi
- Situs Resemi:**
- Bappenas. Nd. Apa Itu SDGs. Diakses pada tanggal 27 November 2022. Dilihat pada <https://sdgs.bappenas.go.id/>
- BPS. Nd. Tingkat penyelesaian pendidikan menurut jenjang pendidikan dan provinsi 2015-2016. Diakses pada tanggal 15 desember 2022. Dilihat pada <https://www.bps.go.id/indicator/28/1980/3/tingkat-penyelesaian-pendidikan-menurut-jenjang-pendidikan-dan-provinsi.html>
- Country Programme Action Plan Government of Indonesia ii. (2016). Retrieved from <https://ktln.setneg.go.id/simpuu/file/MU%20LATERAL/UN%20BODIES/CPAP%20UNICEF%20Indonesia%202016-2020.pdf>
- Pustaka borneo. Nd. SDGs Indonesia. diakses pada tanggal 3 Januari 2023. Dilihat pada <https://www.pustakaborneo.org/ed-sdgs/sdgs/sdgs-di-indonesia.html#gsc.tab=0>
- UNICEF Indonesia. Nd. Pendidikan dan remaja. Diakses pada tanggal 27 November 2022. Dilihat pada <https://www.unicef.org/indonesia/id/pe-ndidikan-dan-remajahttps>

- UNICEF Indonesia. Nd. Sebuah Gambaran: SDG dan Anak-anak di Indonesia. diakses pada tanggal 2 Desember 2022. Dilihat pada <https://www.unicef.org/indonesia/media/1651/file/SDG%20Snapshot.pdf>
- UNICEF Indonesia. nd. Upaya UNICEF mendahulukan setiap anak. Diakses pada tanggal 20 Desember 2022. Dilihat pada <https://www.unicef.org/indonesia/id/what-we-do#:~:text=Melalui%20dukungan%20yang%20diberikan%20kepada,mana%20pun%20anak%20itu%20berada>
- UNICEF Indonesia. Nd. Roadmap of SDGs Indonesia. diakses pada tanggal 3 Januari 2023. Dilihat pada <https://www.unicef.org/indonesia/reports/roadmap-sdgs-indonesia>
- Website:**
- Pujiastuti. 2015. Pemerintah dan Unicef kerja sama penuli hak nak di RI. Diakses pada tanggal 9 februari 2023. Dilihat pada <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3105236/pemerintah-dan-unicef-kerja-sama-penuhi-hak-anak-di-ri>
- Wibowo, F., Ibnu. 2019. UNICEF Terus kampanyekan pentingnya pendidikan inklusi. Diakses pada tanggal 2 Maret 2023. Dilihat pada <https://beritajatim.com/pendidikan-kesehatan/unicef-terus-kampanyekan-pentingnya-pendidikan-inklusi/>
- Times Jatim. 2019. UNICEF: Ruang umum harus terima keberadaan anak berkebutuhan khusus. Diakses pada tanggal 4 maret 2023. Dilihat pada <https://jatim.times.co.id/news/berita/levb5bc9hw/unicef-ruang-umum-harus-terima-keberadaan-anak-berkebutuhan-khusus>
- KOMPAS.com. (2022). *Hak Warga Negara dalam Pasal 31 UUD 1945*. PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/03000041/hak-warga-negara-dalam-pasal-31-uud-1945>
- Oebaidillah, Syarief. 2018. Kemendikbud-UNICEF meluncurkan laporan garis acuan pembangunan berkelanjutan. Diakses pada tanggal 9 maret 2023. Dilihat pada <https://mediaindonesia.com/humaniora/196142/kemendikbud-unicef-luncurkan-laporan-garis-acuan-pembangunan-berkelanjutan>